

PERPAJAKAN

DI INDONESIA

PERPAJAKAN

DI INDONESIA

Edy Suprianto

PERPAJAKAN DI INDONESIA

Oleh : Edy Suprianto

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2010

Hak Cipta © 2010 pada penulis,

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari No. 7A

Yogyakarta 55283

Telp. : 0274-889836; 0274-889398

Fax. : 0274-889057

E-mail : info@grahailmu.co.id

Suprianto, Edy

Perpajakan di Indonesia/

Edy Suprianto -

Edisi Pertama - Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010

x + 131 hlm, 1 Jil. : 23 cm.

ISBN: 978-979-756-719-4

1.

I. Judul

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, penyusun telah menyelesaikan suatu buku Perpajakan di Indonesia. Buku ini disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku hingga tahun 2010, selain itu buku ini disediakan pula contoh-contoh soal di bidang perpajakan beserta petunjuknya sehingga sangat mudah dipahami oleh para pembaca.

Praktik perpajakan di Indonesia saat ini telah berkembang begitu pesat mengikuti perkembangan zaman saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan pajak yang ditargetkan oleh Dirjen Pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak di Indonesia. Dengan peningkatan jumlah wajib pajak ini maka akan ada tuntutan bagi wajib itu sendiri untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajaknya, karena sistem perpajakan di Indonesia lambat-laun secara global sudah mengarah pada self assessment system. Kebanyakan masyarakat masih awam terhadap perpajakan. Untuk itulah, penulis mencoba menulis sedikit tata cara dan prosedur perpajakan di Indonesia.

Buku ini secara langsung telah direview oleh pegawai pajak dibagian Tax Audit Bapak Tirsono, Msi, Akt, untuk itu penulis meng-ucapkan banyak terima kasih. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyajikan buku ini, maka penulis mohon kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas buku Perpajakan di Indonesia ini. Semoga buku ini dapat berguna bagi semua pemakai dan penulis. Amin.

Semarang, November 2010

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENGERTIAN PAJAK 1

- 1.1 Pendahuluan 1
- 1.2 Justifikasi Pajak dan Prinsip Pemungutan Pajak 3
- 1.3 Wajib Pajak 5
- 1.4 Fungsi Pajak 6

BAB II PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 9

- 2.1 Pendahuluan 9
- 2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 10
- 2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 11
- 2.4 Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah 12
- 2.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pemotongan Pph
Pasal 21 13
- 2.6 Cara Pembayaran Pph Pasal 21 Kepada Karyawan 13
- 2.7 Cara Menghitung Besarnya Pph Pasal 21 14
- 2.8 Ketentuan Penghitungan Pph Pasal 21 17
- 2.9 Beberapa Hal yang Perlu Diketahui Kaitannya
dengan Pph Pasal 21 20
- 2.10 Saat Terutang Pph Pasal 21 20

BAB III PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 31

- 3.1 Pendahuluan 31
- 3.2 Pemungut Pph Pasal 22 32
- 3.3 Beberapa Barang yang Tergolong Mewah yang
Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 33
- 3.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 34
- 3.5 Dasar Pengenaan Pajak 35

BAB IV PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 37

- 4.1 Pendahuluan 37
- 4.2 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 38
- 4.3 Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 38
- 4.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 39
- 4.5 Tarif Bagi Wajib Pajak Tak Ber-npwp 40

BAB V PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 41

- 5.1 Pendahuluan 41
- 5.2 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 24 42
- 5.3 Kredit Pajak Penghasilan Pasal 24 43

BAB VI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, 29, 28A, & 31E 45

- 6.1 Pendahuluan 45
- 6.2 Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 46
- 6.3 Perlakuan Khusus Perhitungan Pph Terutang
untuk Wajib Pajak Badan 48
- 6.4 Beberapa Ketentuan Kaitannya dengan Pajak
Penghasilan Pasal 25 50

BAB VII PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 59

- 7.1 Pendahuluan 59
- 7.2 Pemotong Pph Pasal 26 60
- 7.3 Tarif dan Objek Pph Pasal 26 60

7.4	Saat Terutang, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Spt Masa Pph Pasal 26	61	
BAB VIII	PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2)	63	
8.1	Pendahuluan	63	
8.2	Objek Pajak	63	
8.3	Tarif Pph Pasal 4 (2)	64	
BAB IX	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPNBM)	67	
9.1	Pendahuluan	67	
9.2	Penyerahan Barang Kena Pajak	71	
9.3	Objek Pajak	72	
9.4	Subjek Pajak	74	
9.5	Faktur Pajak	77	
9.6	Tarif Pajak Pertambahan Nilai	81	
9.7	Dasar Pengenaan Pajak	81	
9.8	Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai	83	
BAB X BEA METERAI		87	
10.1	Pendahuluan	87	
10.2	Subjek Bea Meterai	88	
10.3	Saat Terutang Bea Meterai	88	
10.4	Objek Bea Meterai	89	
10.5	Dokumen yang Tidak Terutang Bea Meterai	90	
10.6	Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai	91	
10.7	Cara Pelunasan Bea Meterai	92	
10.8	Syarat Pelunasan Bea Meterai dengan Mesin Teraan Meterai	93	Menggunakan
10.9	Kewajiban Penerbit Dokumen yang Mendapatkan Izin Penggunaan Mesin Teraan Meterai	94	
10.10	Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian	94	
10.11	Sanksi Tidak atau Kurang Melunasi Bea Meterai	95	
BAB XI	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	97	
11.1	Pendahuluan	97	
11.2	Objek Pajak Bumi dan Bangunan	98	
11.3	Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	99	
11.4	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	100	
11.5	Tarif, Dasar, dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	101	
11.6	Klasifikasi Bumi dan Bangunan serta Penerapannya dalam Menghitung Pbb	102	
11.7	Persentase Nilai Jual Kena Pajak (Njpk)	108	
11.8	Kelebihan Pembayaran Pbb	110	
11.9	Keberatan Atas Pengenaan Pbb	111	
BAB XII	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	113	
12.1	Pendahuluan	113	
12.2	Objek Bphtb	114	
12.3	Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Bphtb	115	
12.4	Subjek Pajak Bphtb	115	
12.5	Tarif Pajak	115	

12.6	Dasar Pengenaan Bphtb	115
12.7	Pengenaan Bphtb	116
12.8	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (Npoptkp) Ditetapkan Secara Regional Paling Banyak	117
12.9	Saat, Tempat, dan Cara Pembayaran Pajak Terutang	118
12.10	Tempat Pajak Terutang adalah Di Wilayah Kabupaten, Kota, atau Provinsi yang Meliputi Letak Tanah dan Bangunan.	119
12.11	Cara Penghitungan Bphtb	119
BAB XIII	MANAJEMEN PAJAK	123
13.1	Pendahuluan	123
13.2	Prinsip Manajemen Pajak	125
13.3	Metode/cara Manajemen Pajak	125
DAFTAR PUSTAKA		129

DAFTAR PUSTAKA

Endang Kiswara, 2004, “ *Aplikasi Akuntansi Perpajakan Indonesia*” EKC. Semarang

HM. Zain, *Manajemen Pajak*, Salemba Empat, 2003

Mulyadi, 2006, “ *Perpajakan*” Salemba, Edisi 4

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*, PT.
MITRAINFO – Jakarta – 2000

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang *PPN & PPnBM*

www.pajak.go.id